

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2013-2017)**

Rukmana Is Lampunu¹, Ratna Ambar Mintarsih²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “YKP” Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this study was to measure the effect of regional taxes and local user fees on increasing local own-source revenue in the province of Yogyakarta Special Region in the 2013-2017 period. The data used in this study are secondary data obtained from the official website of the Central Statistics Agency in the form of the APBD report of the Special Region of Yogyakarta. The population and sample in this study are all districts and cities in the Yogyakarta Special Region province. Data analysis techniques used in this study were descriptive statistical analysis, multiple regression analysis, and hypothesis testing consisting of t test, F test and determination test (R²) as well as calculation of effective contributions, which were tested using SPSS 2.3.

Based on testing the hypothesis by using the t test, it was concluded that local taxes affect the increase in regional own-source revenue and local user fees do not affect the increase in regional original income. Based on the results of the F test of regional taxes and regional levies together affect the increase in local revenue. determination (R²) is known that the adjusted R square result is 0.910 or 91.0%, this shows that local original income can be explained by the local tax variable and regional retribution of 91.0%. As for the results of the calculation of effective contributions, it is known that the contribution of local taxes by 89.19% to the increase in local revenue while for the regional levies the contribution of the effect on the increase in the local revenue is only 2.61%.

Keywords: Regional Tax, Regional Retribution, and Local Original Revenue (PAD).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengukur pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik berupa laporan APBD provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F dan uji determinasi (R^2) serta perhitungan sumbangan efektif, yang diuji menggunakan SPSS 2.3.

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil uji F pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. determinasi (R^2) diketahui bahwa hasil adjusted R square adalah 0,910 atau 91,0% hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 91,0%. Adapun untuk hasil perhitungan sumbangan efektif diketahui bahwa kontribusi pajak daerah sebesar 89,19 % terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sedangkan untuk retribusi daerah kontribusi pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatn asli daerah hanya sebesar 2,61 %.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang mengakibatkan sulitnya pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan dan mengontrol jalannya pemerintahan provinsi maupun daerah-daerah kabupaten dan kota yang ada. Oleh karena itu, guna mempermudah jalannya roda pemerintahan yang ada ditiap-tiap provinsi maupun daerah-daerah kabupaten dan kota di Indonesia maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah dalam menjalankan pemerintahannya serta mengatur urusan rumah tangga daerahnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 yaitu tentang pemerintah daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan”. Dalam menjalankan pemerintahannya, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, dan hak untuk

mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya guna meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Optimalisasi pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut menjadi lebih mandiri dalam bidang keuangannya.

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia, provinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pada tahun 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY merilis pertumbuhan ekonomi di DIY tumbuh senilai 6,20 % meningkat dibandingkan dengan tahun 2017, secara sektoral pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh lapangan usaha konstruksi yang tumbuh sebesar 13,1% dan pertambahan penggalan tumbuh sebesar 10,6 % . Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan yang cukup tinggi berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dijuluki kota pelajar provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga termasuk dalam salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Data dinas pariwisata kota Yogyakarta menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir yaitu dari 2014 sebesar 3.007.253 dan 2018 berjumlah 4.103.240. Hal inilah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar dalam peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pajak restoran dan hotel. Selain sektor pariwisata terdapat sumber-sumber pajak daerah yang lain seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten dan kota, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walis, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, untuk retribusi daerah terbagi menjadi 3, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017)”**.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan asli daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh lebih besar antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Unsur pokok keuangan daerah adalah sebagai berikut : 1) hak daerah, 2) kewajiban daerah, 3) kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dan 4) dapat dinilai dengan uang.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), dimana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

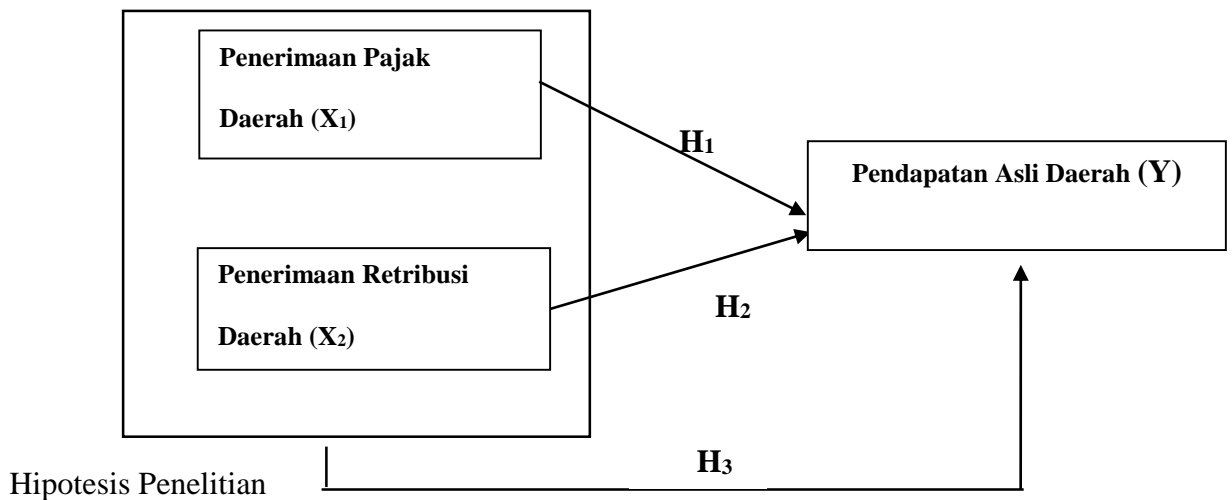
Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Kerangka Berfikir



H₁ : Diduga penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017.

H₂: Diduga penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017.

H₃ : Diduga penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan penelitian deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan

secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Dr. Ananta Wikrama Tungga dan Komang Adi Kurniawan Saputra , 2014 : 11),

Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan satu atau lebih variabel tanpa perlu membandingkan atau mencari hubungan antar variabel. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang fakta atau populasi tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat. (Suliyanto: 2014).

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan waktu penelitian dimulai dari tanggal 25 Juni sampai dengan 31 Juli 2019.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan APBD pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013-2017.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel yaitu berupa variabel independen dan variabel dependen.

- a) Variabel independen adalah atribut atau karakteristik yang dapat memberikan pengaruh atau dampak dari variabel dependen. (H. Fajri Ismail, 2018 : 65). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2)
- b) Variabel dependen adalah atribut atau karakteristik yang bebas atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini menjadi

objek utama dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y)

Uji Hipotesis

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya) (Sugiyono, 2006 : 250).
Pesamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Y = Pendapatan Asli Daerah

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

a = Konstanta

B₁, B₂ = Koefisien regresi

e = *error*

Uji t (parsial) merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel yang terdiri dari variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Uji t (parsial) dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) 5% serta derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang digunakan adalah $df_1 = n - k$. Taraf nyata inilah yang akan digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis. Penerimaan atau penolakan atas hipotesis sebagai berikut : Jika nilai signifikansi atau sig. < 0,05 maka hipotesis (H₁ dan H₂) diterima dan jika nilai signifikansi atau sig. > 0,05 maka hipotesis (H₁ dan H₂) ditolak.

Uji F pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen (X) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Uji F memiliki

tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis $\alpha = 5\%$ derajat bebas pembilang $df_1 = (k-1)$ dan derajat bebas penyebut $df_2 = (n-k)$, dimana k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Berdasarkan nilai signifikan dasar pengambilan keputusan adalah: jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_3 ditolak dan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_3 diterima

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. (Priyatno, 2008 :73) . Dalam hal ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengujian sumbangan efektif dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan untuk menghitung sumbangan efektif adalah sebagai berikut :

$$SE = R \times B \times 100\%$$

Dimana : SE = sumbangan efektif, R = nilai koefisien korelasi

B = beta , 100 = nilai konstan.

Dalam penelitian ini uji sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

PEMBAHASAN

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasinya.

Hasil analisis data statistik deskriptif dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Disajikan dalam Miliar

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	25	7,63	528,45	168,2528	156,85517
Retribusi Daerah	25	6,78	56,90	29,5332	13,66981
Pendapatan Asli Daerah	25	64,75	825,64	363,2712	212,32880
Valid N (Listwise)	25				

Sumber : Output SPSS

Uji Hipotesis

Hasil perhitungan analisis regresi berganda diperoleh seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil analisis regresi berganda
(uji t/parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	135,552	33,558		4,039	,001
Pajak Daerah	1,260	,134	,931	9,366	,000
Retribusi Daerah	,534	1,543	,034	,346	,733

Sumber : Output SPSS

Uji Regresi

Berdasarkan tabel hasil regresi linear berganda untuk pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 135,552 + 1,260X_1 + 0,534X_2 + e$$

Dimana :

$$a = 135,552$$

$$B_1X_1 = 1,260$$

$$B_2X_2 = 0,534$$

Pada tabel diatas juga menjelaskan bahwa hasil uji t untuk pajak daerah memiliki nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima. Hasil uji t untuk retribusi daerah memiliki nilai signifikansi 0,733 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditolak.

Uji F (Simultan)

Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	992,905,307	2	496,452,653	122,582	,000 ^b
Residual	89,099,194	22	4,049,963		
1 Total	1,082,004,501	24			

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 artinya pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Uji Determinasi (R^2)

Adapun hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Hasil Uji Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,958 ^a	,918	,910	6,363,932

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil adjusted R square adalah 0,910 atau 91,0% hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 91,0%, sedangkan sisanya 9% (100%-91,0%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Sumbangan Efektif

Berikut adalah tabel perhitungan sumbangan efektif :

Tabel Perhitungan Sumbangan Efektif

variabel	R	B	perhitungan	SE
X ₁	0.958	0.931	0,958 X 0,931 X 100 %	89.19 %
X ₂	0.768	0.034	0.768 X 0.034 X 100 %	2.61 %
Total Sumbangan Efektif				91,8 %

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas diperoleh hasil dari masing-masing variabel pajak daerah (X₁) sebesar 89,19 % yang artinya kontribusi pajak daerah sebesar 89,9 % terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, sedangkan untuk retribusi daerah (X₂) sebesar 2,61 % yang artinya kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 2,61 % terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta pada tahun 2013-2017. Dengan demikian sumbangan pajak daerah lebih besar terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah.

Pembahasan

1) Pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif diketahui bahwa penerimaan pajak daerah terbesar diperoleh kabupaten Sleman pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 528,45 miliar. Penerimaan pajak daerah terkecil diperoleh kabupaten Kulonprogo pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 7,63 miliar. Rata-rata penerimaan pajak daerah adalah sebesar Rp 168,2528 miliar dengan standar deviasi Rp 156,85517 miliar. Hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2017 termasuk dalam kategori sangat kuat yang berada pada interval 0,80-1,000.

Adapun hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai signifikan 0,000. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan hasil sumbangan efektif yaitu sebesar 89,19 %, sedangkan hasil pengujian determinasi adalah 0,910 atau 91,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 91,0% , sedangkan sisanya 9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Dina Anggraeni (2010) bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi Bengkulu pada tahun 2004-2008 dan Luzy Okta Dila (2014) yang juga menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada kota dan kabupaten di wilayah Indonesia tahun 2010-2012.

- 2) Pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif diketahui bahwa penerimaan retribusi daerah terbesar yaitu diperoleh kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar Rp 56,90 miliar, sedangkan penerimaan retribusi daerah terkecil diperoleh kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 6,78 miliar. Rata-rata penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 29,5332 miliar dengan standar deviasi yaitu Rp 13,66981.

Hubungan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013-2017 termasuk dalam kategori kuat dengan nilai korelasi 0,768 yang berada pada interval 0,60-0,79. Adapun hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai signifikan 0,733.

Besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilihat dari hasil perhitungan sumbangan efektif yaitu sebesar 2,61 %.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggraeni (2010) dan penelitian Luzy Okta Dila (2014) bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2017. Hal ini dikuatkan dengan hasil uji t yang memiliki nilai signifikansi 0,000 .
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017, karena hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi retribusi daerah sebesar 0,733 .
3. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 .
4. Berdasarkan hasil uji determinasi (R^2) diketahui bahwa hasil adjusted R square adalah 0,910 atau 91,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 91,0% , sedangkan sisanya 9% (100%-91,0%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
5. Berdasarkan hasil perhitungan sumbangan efektif diketahui bahwa pajak daerah lebih besar kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 89,19 %

sedangkan untuk retribusi daerah kontribusi pengaruhnya hanya sebesar 2,61 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2010. Akuntansi Perpajakan, Edisi dua. Jakarta : Salemba Empat.
- Aidah, 2011. “Model *Time Series Autoregressive* Untuk Peramalan Tingkat Inflasi Kota Pekanbaru”, *Tugas Akhir*, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru. [internet].
Tersedia di : <http://repository.uin-suska.ac.id>
- Anggraeni, Dina. 2010. “ Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Bengkulu) ” , *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. [internet].
Tersedia : <http://repository.uinjkt.ac.id>
- Ayuwardani, Rizky Primadita. 2018. “Pengaruh Informasi Keuangan dan Non Keuangan Terhadap *Underpricing* Harga Saham Pada Perusahaan yang Melakukan *Initial Public Offering* (Studi Empiris Perusahaan Go public yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)”, *Jurnal Nominal*, No. 1. [internet].
Tersedia di : <https://journal.uny.ac.id>
- Dila, Luzy Okta. 2014. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota dan Kabupaten di Wilayah Indonesia”, *skripsi*. Universitas Bengkulu.
- Diza, Mohd. Ranga. 2009. “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara”, *skripsi*. Universitas Sumatera Utara. [internet].
Tersedia di : <http://repository.usu.ac.id>
- Indriyanti, A., & Arisma, Y. (2019). Analisis Penggunaan Iklan Televisi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Oleh Mahasiswa Stie “Ykp” Yogyakarta. *Prima Ekonomika*, 10(2), 36-50.

- Ismail, H. Fajri. 2018. Statistik (Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial), edisi pertama. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Jati, Ahmad Waluya. “ Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Daerah Tingkat II di Jawa Timur) ”, *Jurnal Balance*, Vol. 13. [internet].
Tersedia di : <http://ejournal.umm.ac.id>
- Memah, Edwar W. 2013. “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado”, *Jurnal Emba*, Vol. 1 No. 3 [internet]
Tersedia di : <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Musyarofan, Siti. 2007. “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”, *Jurnal Investasi*, Vol. 3 No. 2 [internet].
Tersedia di : <http://journal.trunojoyo.ac.id>
- Octovido, Irsandi. 2014. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 15 No. 1. [internet].
Tersedia di : <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>
- Priyatno, Duwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS. Yogyakarta : Mediakom.
- Republik Indonesia. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer (Konsep Perpajakan Indonesia), Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siahaan, Marhot Pahala. 2010. Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak), Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung : ALFABETA.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. Penelitian Akuntansi dengan SPSS. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Supriyadi. 2016. Community Of Practitioners : “Solusi ALternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”. *Jurnal*. [internet].
Tersedia di : <http://ejournal.undip.ac.id>
- Timotius, Kris H. 2017. Metode Penelitian (Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan), Yogyakarta : ANDI.
- Tunas, Derlina S. 2013. “Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”, *Jurnal*, Vol. 1 No. 4. [internet].
Tersedia di : <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Tungga, Ananta Wikrama dan Komang Adi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis, cetakan pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5523/Bab%202.pdf?sequence=10>, diakses tanggal 3 Juli 2019, Pukul 20.10 WIB
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta#Ekonomi,
Diakses tanggal 9 Agustus 2019 pukul, Pukul 20.15 WIB